



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat penjelasan tentang kondisi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauhmana realisasi pembangunan daerah akan dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauhmana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan apa yang terjadi dalam perekonomian suatu negara atau daerah adalah indikator ekonomi makro. Dengan indikator ini dapat diketahui banyak aspek dan kondisi eksisting serta perkiraan perkembangan perekonomian suatu daerah ke depan. Selanjutnya indikator ekonomi makro akan berperan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi dan menentukan arah pembangunan suatu negara atau daerah. Strategi dan Kebijakan pembangunan ekonomi yang telah diambil pada tahun sebelumnya perlu dimonitor dan dievaluasi serta dilihat hasilnya sehingga penentuan kebijakan selanjutnya dapat lebih baik dan efisien sesuai sasaran.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun sebelumnya dan Perkiraan Tahun 2017 serta Target Tahun 2018

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara riil dapat dilihat dari laju perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang disajikan secara berkala setiap tahunnya, dimana PDRB merupakan salah satu indikator



makro ekonomi yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Perbandingan nilai PDRB ADHK tahun berjalan dengan tahun sebelumnya merupakan angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan.

Kebijakan yang diambil pemerintah baik pusat maupun daerah tentu dengan harapan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Kebijakan tersebut akan tercermin dari kondusifitas makro ekonomi daerah. Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat yang bermuara kepada target penurunan angka kemiskinan.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram tercermin dari meningkatnya angka produk domestik regional bruto (PDRB). Peningkatan PDRB ini juga diikuti dengan kemampuan mengendalikan laju inflasi yang sehat bagi perkembangan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram secara ringkas ditampilkan pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.1
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2015-2016 dan
Proyeksi 2017-2018**



Ket: * Angka Proyeksi ** Angka Prediksi *** Angka Target
Sumber: BPS Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram, data diolah

Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Mataram sebesar 7,99 persen dan pertumbuhan Tahun 2016 meningkat menjadi 8,06 persen. Dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 Kota Mataram optimis menargetkan pertumbuhan ekonomi terus meningkat menjadi 8,11 persen tahun 2017 serta 8,17 persen tahun 2018.



3.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik itu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang mampu mencerminkan kegiatan perekonomian di suatu daerah. PDRB sangat penting sebagai bahan evaluasi dan dasar perencanaan bagi pembangunan khususnya di bidang ekonomi agar dapat disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan di masing-masing daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode lainnya.

Perhitungan PDRB yang dilakukan oleh BPS saat ini tidak lagi menggunakan 9 indikator namun menggunakan 17 indikator, demikian pula tahun dasar yang digunakan telah ditetapkan menggunakan tahun dasar 2010 sehingga perhitungan terhadap PDRB telah dilakukan penyesuaian.

Tabel 3.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mataram Tahun 2015 - 2017

LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Juta Rp)			KONTRIBUSI TERHADAP		
	2015	2016	2017***	2015	2016	2017** *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	525,151	584,819	652,520	3.97	3.87	3.78
Pertambangan dan	0,925	0,966	1,010	0.01	0.01	0.01
Industri Pengolahan	1.191,10	1.325,20	1.477,391	9.00	8.78	8.56
Pengadaan Listrik dan Gas	10,668	12,323	14,268	0.08	0.08	0.08
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah,	28,648	32,357	36,581	0.22	0.21	0.21
Konstruksi	1.356,60	1.578,51	1.839,248	10.25	10.45	10.66
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	2.644,47	3.023,30	3.460,304	19.97	20.02	20.06
Transportasi dan	805,031	932,699	1.082,402	6.08	6.18	6.27
Penyediaan Akomodasi dan Makan	241,723	282,857	331,578	1.83	1.87	1.92
Informasi dan	797,340	860,415	928,294	6.02	5.70	5.38
Jasa Keuangan dan	1.304,84	1.504,66	1.736,670	9.86	9.96	10.07
Real Estate	685,043	778,820	886,239	5.17	5.16	5.14



LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Juta Rp)			KONTRIBUSI TERHADAP		
	2015	2016	2017***	2015	2016	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jasa Perusahaan	57,499	65,058	73,678	0.43	0.43	0.43
Administrasi Pemerintahan,	1.231,85	1.413,91	1.625,694	9.30	9.36	9.42
Jasa Pendidikan	1.121,32	1.286,17	1.476,856	8.47	8.52	8.56
Jasa Kesehatan dan	605,822	691,990	791,219	4.58	4.58	4.59
Jasa Lainnya	631,181	727,656	839,891	4.77	4.82	4.87
PDRB	13.219,267	15.129,045	17.253,852	100,00	100,00	100,00

Keterangan : ***) Angka Prediksi

Sumber: BPS Kota Mataram, 2017

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHB) terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 PDRB ADHB sebesar Rp.13,24 Trilyun, diprediksikan meningkat menjadi Rp. 15,10 Trilyun pada Tahun 2016 serta Rp. 17,25 Trilyun di Tahun 2017.

Sejalan dengan PDRB ADHB, nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 PDRB ADHK sebesar Rp.10,68 Trilyun, diprediksikan meningkat menjadi Rp. 11,54 Trilyun pada Tahun 2016 dan Rp. 12,47 Trilyun Tahun 2017. Capaian PDRB ADHK tahun 2015-2017 serta proporsinya sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Mataram Tahun 2015 - 2017

LAPANGAN USAHA	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp.)			Kontribusi terhadap Pembentukan PDRB		
	2015	2016	2017***	2015	2016	2017***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan dan	440,169	454,986	470,266	4.12	3.94	3.77
Pertambangan dan Penggalian	0,800	0,801	0,803	0.01	0.01	0.01
Industri Pengolahan	1.104,769	1.170,501	1.240,705	10.34	10.14	9.94
Pengadaan Listrik dan Gas	11,877	11,975	12,070	0.11	0.10	0.10
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,113	22,713	24,434	0.20	0.20	0.20
Konstruksi	1.187,298	1.294,337	1.411,212	11.12	11.21	11.31
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	2.070,187	2.239,167	2.422,184	19.38	19.40	19.41
Transportasi dan Pergudangan	660,864	716,873	777,710	6.19	6.21	6.23
Penyediaan Akomodasi dan Makan	156,270	169,366	183,581	1.46	1.47	1.47
Informasi dan Komunikasi	782,078	851,875	928,020	7.32	7.38	7.44
Jasa Keuangan dan Asuransi	971,222	1.080,379	1.202,143	9.09	9.36	9.63



LAPANGAN USAHA	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp.)			Kontribusi terhadap Pembentukan PDRB		
	2015	2016	2017***	2015	2016	2017***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Real Estate	511,533	557,082	606,764	4.79	4.83	4.86
Jasa Perusahaan	46,121	49,888	53,968	0.43	0.43	0.43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	780,999,	814,242	848,792	7.31	7.05	6.80
Jasa Pendidikan	849,810	926,166	1.009,514	7.96	8.02	8.09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan	532,370	579,291	630,424	4.98	5.02	5.05
Jasa Lainnya	553,300	602,011	655,089	5.18	5.22	5.25
PDRB	10,680,375	11,541,099	12.477.688	100.00	100.00	100.00

Keterangan : ***) Angka Prediksi

Sumber: BPS Kota Mataram, 2017

Nilai tambah bruto sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi leading sektor bagi perekonomian selama 3 tahun berturut-turut baik pada PDRB ADHB maupun ADHK. Hal tersebut ditunjang oleh posisi Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB yang menjadikannya sebagai pusat perdagangan, sehingga arus keluar masuk barang dari berbagai daerah terjadi di Kota Mataram dan dalam RTRW Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi, hal tersebut berdampak pada pertumbuhan PDRB Kota Mataram.

3.1.1.3 Laju Inflasi

Salah satu indikator makro ekonomi yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi adalah tingkat perubahan harga atau inflasi. Inflasi adalah perubahan harga barang di tingkat konsumen, atau merupakan persentase perubahan dari Indeks Harga Konsumen (IHK). perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya, dimana kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

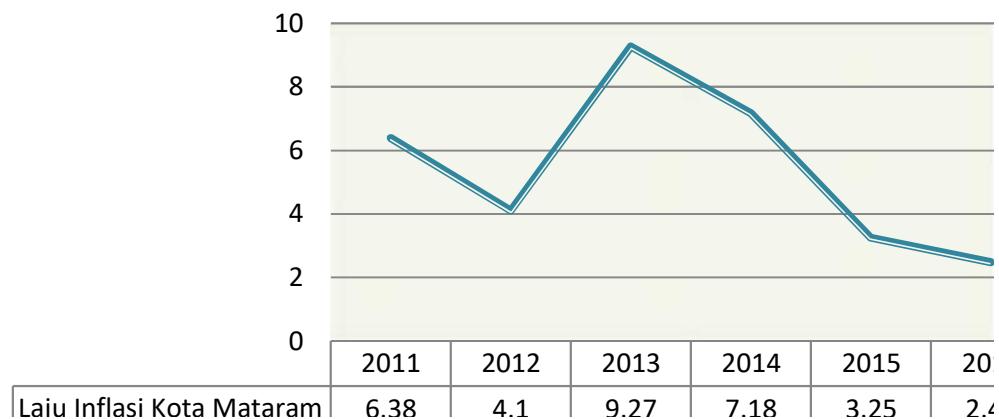
Terkait dengan inflasi, berbagai kebijakan dibidang moneter telah diambil oleh Pemerintah dalam menstabilkan kondisi harga-harga barang di



lapangan. Dalam PDRB, kenaikan harga barang dicerminkan oleh perkembangan laju Indeks Harga Implisit (IHI), yang menggambarkan tingkat inflasi menyeluruh dari seluruh kegiatan perekonomian mulai dari Sektor Pertanian sampai dengan sector Jasa atau dengan kata lain tingkat perubahan IHI menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sektor/sub sektor. Secara agregat, IHI menunjukkan tingkat perubahan harga yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu selama satu tahun. Besaran IHK ditentukan oleh perubahan harga komoditi yang paling dominan dikonsumsi suatu daerah, sedangkan besaran IHI ditentukan oleh perubahan harga sektor ekonomi yang paling potensi atau memiliki kontribusi yang dominan.

Untuk melihat tingkat perubahan harga (inflasi) Kota Mataram tahun 2013 - 2016 secara lebih rinci dapat dilihat pada grafik 3.2 berikut ini:

Grafik 3.2
Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2011 – 2016



Pada tahun 2014 inflasi Kota Mataram sebesar 7,18 persen sebagai akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada peningkatan harga bahan makanan dan biaya transportasi dan komunikasi. Namun pada tahun 2015 serta 2016 inflasi dapat ditekan kembali di angka 3,28 persen sebagai akibat stabilnya harga baik dari komponen *administered price* maupun *volatile food* yang berkontribusi positif dalam penurunan angka inflasi Kota Mataram. Namun diakhir tahun 2016 hingga awal Tahun 2017 Kota Mataram dibayangi oleh peningkatan harga cabai yang tinggi sebagai akibat lonjakan harga di Jakarta dan mempengaruhi seluruh daerah di Indonesia.

Melihat perkembangan yang terjadi, pada Tahun 2017 TPID Kota Mataram menerapkan beberapa aksi diantaranya pengembangan Kelurahan Bebas Inflasi di Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan. Kelurahan Bebas Inflasi diwujudkan



dengan penanaman komoditas cabai dan beberapa komoditas pangan untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga dengan memanfaatkan lahan pekarangan dan lorong jalan umum dengan metode hidroponik. Harapannya, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan kenaikan harga pangan yang terjadi karena kebutuhan mereka dapat terpenuhi dari hasil pemanfaatan lahan pekarangan dan lorong jalan umum. TPID Kota Mataram bersama TPID Provinsi NTB juga akan mengkomunikasikan kepada pengambil keputusan di tiap tingkatan agar memperhatikan siklus inflasi bulanan dalam penetapan harga *administred price* seperti BBM dan Tarif PDAM yang peningkatannya dapat berdampak *multiplier* terhadap harga barang lain. Dengan beberapa rencana tindak lanjutnya target inflasi Kota Mataram di tahun 2017 diupayakan untuk dikendalikan pada tingkat 4 persen (± 1 persen) sesuai dengan target RPJMD.

3.1.1.4 Tingkat Pengangguran

Pertambahan jumlah penduduk memberikan dampak terhadap penyediaan kebutuhan tempat tinggal dan berbagai fasilitasnya seperti ketersediaan listrik dan air. Hal inilah yang berperan dalam pertumbuhan sektor listrik, gas dan air.

Sementara tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah juga sangat tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Begitu pula dengan beragamnya kegiatan perekonomian yang ada, sangat tergantung pada sumber daya yang tersedia. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan persentase tingkat pengangguran terbuka sangat berguna untuk melihat prospek ekonomi yang ada di Kota Mataram.

Tabel 3.3
Statistik Ketenagakerjaan Kota Mataram Tahun 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016*
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	61,20	63,31	65,31
UMR (Rp)	1.400.000	1.500.000	1.550.000
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,79	4,15	3,52
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	95,21	92,50	94,14

* angka proyeksi

Sumber: BPS Kota Mataram, data diolah Bappeda Kota Mataram, 2017



Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh Kota Mataram telah diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Target Tingkat Kesempatan Kerja yang mencapai (%) sebesar 92,50 persen merupakan salah satu syarat dalam mendukung target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2015 yang ditetapkan.

Dalam upaya pengukuran pencapaian tingkat ketersediaan lapangan kerja di Kota Mataram diperlukan adanya indikator kinerja ketenagakerjaan yang dapat merepresentasikan tingkat keberhasilan yang mampu dicapai. Salah satunya indikator tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dari definisinya, TPAK sebagai salah satu indikator ketenagakerjaan yang dapat memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Mataram pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,11% dari tahun 2014 dan di proyeksikan pada tahun 2016 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 65,31. Peningkatan TPAK Kota Mataram didukung oleh perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran; jasa serta sektor industri kretaif.

Indikator ketenagakerjaan lainnya yang tidak kalah penting adalah pengukuran Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Secara definisi Tingkat Kesempatan Kerja dapat memberikan gambaran peluang seseorang penduduk pada usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Secara umum TKK mengalami penurunan sebesar (2,71) dari 95,21% pada tahun 2014 menjadi sebesar 92,50 tahun 2015 dan pada tahun 2016 diproyeksikan TKK Kota Mataram menjadi sebesar 94,14. Untuk diketahui, komponen penghitungan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) meliputi jumlah penduduk berkerja berbanding dengan jumlah angkatan kerja. Penurunan angka TKK dimaksud bukan semata-mata menunjukkan ketidak berhasilan pencapaian kinerja ketenagakerjaan akan tetapi lebih pada makin tingginya jumlah angkatan kerja yang ada di Kota Mataram. Posisi strategis Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan serta pusat perdagangan dan jasa menjadi penyumbang tingginya jumlah angkatan kerja tersebut. Sedangkan dilihat dari sisi kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam hal perijinan dan penanaman modal sejalan dengan upaya



optimalisasi kinerja ketenagakerjaan.

3.1.1.5 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018

Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram direncanakan tumbuh sebesar 8,11 persen. Berdasarkan target pertumbuhan tersebut maka nilai PDRB ADHB di proyeksikan sebesar Rp.17,25 Trilyun, sedangkan nilai PDRB ADHK diproyeksikan sebesar Rp. 12,48 Trilyun. Sementara pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram diproyeksikan tumbuh sebesar 8,17 persen. Berdasarkan target pertumbuhan tersebut maka nilai PDRB ADHB di proyeksikan sebesar Rp.19,67 Trilyun, sedangkan nilai PDRB ADHK diproyeksikan sebesar Rp. 13,49 Trilyun. Proyeksi ini menitikberatkan pada metode proyeksi trend pertumbuhan serta memperhatikan geliat pertumbuhan dan ekspansi swasta pada beberapa tahun terakhir di Kota Mataram. Proyeksi ekonomi tahun 2018 tersebut juga mensyaratkan kebutuhan investasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara proporsional.

Gambaran demografi tahun 2017, diproyeksikan bahwa jumlah penduduk Kota Mataram sebesar 468.509 jiwa sedangkan pada tahun 2018 menjadi sebesar 477.476 jiwa. Angka ini didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan penduduk 2 persen per tahun. Berkaitan dengan hal tersebut maka PDRB perkapita penduduk Kota Mataram tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp. 36,87 juta/orang/tahun dan diproyeksikan mencapai Rp. 41.210 juta/orang/tahun pada tahun 2018.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Pembangunan perekonomian di Kota Mataram tentu mempunyai beberapa tantangan dan juga prospek yang keduanya dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri. Prospek tentu akan menjadi dukungan yang kuat dalam pembangunan bila dimanfaatkan dengan tepat, tantangan juga dapat dijadikan pendorong dalam pembangunan ekonomi itu sendiri.

Dibawah ini beberapa tantangan dan prospek perkembangan perekonomian Kota Mataram:

Tantangan

1. Komponen pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) merupakan



stimulus bagi perekonomian. adanya kebijakan pemotongan alokasi Dana Perimbangan dan penundaan DAU Kota Mataram dan Provinsi NTB menyebabkan terhambatnya beberapa kegiatan fisik hingga APBD-P ditetapkan yang berujung kepada munculnya potensi melambatnya kinerja ekonomi daerah.

2. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rentan terhadap gejolak harga dengan garis kemiskinan di Kota Mataram sebesar Rp. 397.468,- per kapita per bulan (Tahun 2015).
3. Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami fluktuasi sebagai akibat dari kedudukan Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, pusat perdagangan dan jasa di Nusa Tenggara Barat.
4. Arah perkembangan perekonomian Kota Mataram cenderung pada perdagangan dan jasa.
5. Kota Mataram sebagai pusat kegiatan nasional, berkembangnya industri MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions*).
6. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan pemahaman publik di kalangan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di daerah tentang manfaat dan peluang yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan MEA.
7. Tidak sebandingnya kenaikan jumlah penduduk angkatan kerja dengan penyediaan lapangan kerja dan rendahnya relevansi antara lulusan dan keperluan pasar kerja.
8. Penciptaan wirausahawan baru untuk menyerap angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan.

Prospek

1. Geliat ekonomi yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun terakhir yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi diatas 7-8 % dapat menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menggenjot perekonomian dan mendistribusikannya kearah perekonomian rakyat dalam rangka peningkatan ekonomi inklusif beriringan dengan momentum investasi yang terus menggeliat di Kota Mataram.
2. Posisi geografis Kota Mataram yang terletak pada kawasan segitiga emas pariwisata yaitu Bali-Toraja-Komodo dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) serta lintas transportasi darat nasional merupakan peluang yang strategis bagi



pengembangan investasi dan Kota Mataram memiliki keunggulan dibidang perdagangan dan jasa dibandingkan daerah sekitar di Nusa Tenggara Barat yang menunjang destinasi wisata yang ada dan tersebar di wilayah Pulau Lombok.

3. Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengurus daerahnya, sehingga dapat membuka peluang bagi daerah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam segala aspek pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi riil daerah. Dengan demikian kebijakan-kebijakan tersebut akan dapat diimplementasikan secara nyata.
4. Meningkatkan kualitas *good governance* secara nasional. Globalisasi berdampak sangat luas terhadap semua aspek kehidupan masyarakat termasuk diantaranya meningkatnya tuntutan terhadap *Good Governance*. Meningkatnya tuntutan terhadap *Good Governance* ini merupakan peluang untuk membenahi diri dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, profesional, responsif dan akuntabel sehingga visi pemerintah kota dapat diwujudkan.
5. Geliat pariwisata Nasional yang menetapkan pulau Lombok sebagai Destinasi Halal serta Pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika di NTB yang merupakan satu dari 3 Kawasan Pariwisata se-Nasional yang diprioritaskan tahun 2018, menjadikan Kota Mataram dapat memposisikan diri sebagai salah satu pendukung destinasi pariwisata di NTB.
6. Hubungan internasional yang bersifat global seperti *Asean Free Trade Area* (AFTA), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan *World Trade Organization* (WTO) memberi peluang yang besar untuk mendayagunakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjangkau pasar kerja global. Selain itu, adanya kepercayaan dunia internasional yang cukup tinggi terhadap tenaga kerja Indonesia dapat memberi peluang tingginya penyerapan tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran akan semakin rendah.
7. Dalam RTRW Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional sehingga berkembang industri MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions*).
8. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai tahun 2016 membuka tersedianya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja terampil



dan arus modal di kawasan ASEAN.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. oleh karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

3.2.1. *Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan*

Proyeksi keuangan Daerah Kota Mataram dapat dianalisis dan dikaji dari proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa pendapatan daerah meningkat tiap tahunnya. Hal ini terjadi karena Pemerintah kota Mataram berupaya untuk lebih menggali potensi pendapatan dan penerimaan daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah tersebut sangat berdampak positif bagi kemampuan keuangan daerah Kota Mataram selama ini.

Analisis dan proyeksi sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016**	Proyeksi/Target Tahun 2017	Proyeksi/Target Tahun 2018 (Miliar)
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDAPATAN	1.083.110.566.585,24	1.188.895.261.113,40	579.465.378.978,08	1.400.464.650.169,72	1.613,02
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	202.584.643.687,01	225.076.428.193,84	108.433.629.373,43	270.059.997.207,50	332,93
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	91,749,599,728,00	96.844.712.692,84	47.817.211.966,00	107.034.938.622,52	153,70
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20,956,352,907,00	18.247.789.512,00	7.326.575.771,00	12.830.662.722,00	19,23
1.1.3	Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	8,041,386,510,00	6.219.928.163,00	-	2.577.011.469,00	7,33
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	81,837,304,542,01	103.763.997.826,00	53.289.841.636,43	147.617.384.393,98	152,67
1.2	DANA PERIMBANGAN	677.658.718.414 ,00	757.189.767.596,00	384.071.983.543,00	916.251.865.960,00	1.004,10
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	60,774,417,414,00	52.075.020.596,00	32.426.354.543,00	34.676.226.960,00	56,97
1.2.2	DAU	564,661,391,000,00	593.930.707.000,00	304.508.352.000,00	652.469.339.000,00	729,95



No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016**	Proyeksi/Target Tahun 2017	Proyeksi/Target Tahun 2018 (Miliar)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.3	DAK	52,222,910,000,00	111.184.040.000,00	47.137.277.000,00	229.106.300.000,00	233,44
1.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202,867,204,484,23	206.629.065.323,56	86.959.766.061,65	214.152.787.002,00	275,99
1.3.1	Hibah	11,000,000,000,00	8.778.000.000,00	-	4.334.000.000,00	11,17
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	72.418.554.484,23	66.809.067.323,56	31.860.584.061,65	55.590.093.002,22	72,33
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	119.413.450.000,00	130.989.598.000,00	33.771.444.000,00	154.141.894.000,00	128,76
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	-	0
1.3.6	Pendapatan Lainnya	35.200.000,00	52.400.000,00	21.327.738.000,00	86.800.000,00	88,2

Sumber: RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat maka akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Mataram mencakup kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan Penerimaan atau Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah agar ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Selain itu kebijakan keuangan daerah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD sesuai dengan maksud yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang



mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar. Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan, perkembangan ekonomi makro.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada Pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: (i) *Pendapatan Asli Daerah* meliputi: Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; (ii) *Pendapatan transfer* meliputi: transfer Pemerintah Pusat (terdiri atas dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana Desa) dan transfer antar-Daerah (terdiri atas pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan), dan Kota Mataram menerima pendapatan transfer Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan; dan (iii) *Lain-lain pendapatan Daerah yang sah*, merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan agar proporsi dana dari Pemerintah Pusat dapat diturunkan, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya



manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.

Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah telah memberikan kontribusi yang signifikan dan telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka Strategi Kebijakan Pendapatan Tahun Anggaran 2018 diarahkan pada:

- 1) Penggalian potensi pendapatan daerah melalui updating database potensi;
- 2) Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;



- 3) Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
- 4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerjasama antar OPD pengelola PAD;
- 5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
- 6) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban.
- 7) Peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada.
- 8) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- 9) Penguatan keberadaan kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan.
- 10) Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui sinergi pelayanan antara lembaga teknis pengelola PAD.

Sementara itu, Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan diharapkan terus meningkat melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya dalam penentuan variabel/ komponen berpengaruh terhadap penghitungan jumlah DAU maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk melakukan rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi yang dinilai tidak efektif dan selanjutnya dialihkan kepada DAK diperkirakan akan meningkatkan target pendapatan Dana Perimbangan; juga untuk peningkatan pendapatan daerah yang bersumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat terus ditingkatkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, target Pendapatan Daerah Kota Mataram TA. 2018 diupayakan disusun berdasarkan perkiraan yang rasional dan terukur serta melihat perkembangan realisasi tahun sebelumnya.



3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai salah satu komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Selain itu juga penggunaan belanja daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, penetapan skema kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah harus disesuaikan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang tertuang dalam forum MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat) yang terbagi menjadi MPBM Informasi, MPBM Perencanaan, MPBM Pelaksanaan dan Pengendalian, serta MPBM Evaluasi dan Tindak Lanjut.

Belanja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Pelaksanaan Urusan Wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan, dimana terdapat 6 (enam) urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi



untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, oleh karena itu kebijakan belanja daerah pada tahun 2018 diarahkan untuk:

1. Belanja Tidak Langsung (BTL)

- a. Mengalokasikan belanja pegawai untuk kebutuhan pembayaran: (i) gaji pokok dan tunjangan PNSD selama 14 (empat belas) bulan yaitu untuk pembayaran gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya; (ii) kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; (iii) penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD; (iv) penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD; (v) tambahan penghasilan PNSD berupa Tunjangan Kinerja Daerah selama 13 bulan; (vi) tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD; serta (vii) insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, dialokasikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- c. Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk bantuan keuangan kepada partai politik.
- d. Belanja Tidak Terduga, dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA. 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang.



2. Belanja Langsung (BL)

- a. Penganggaran belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- b. Berupaya mengalokasikan belanja sesuai dimensi pembangunan Nawa Cita sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019.
- c. Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD.
- d. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan minimal 10 persen dari total APBD diluar gaji, sesuai amanat Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- e. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan.
- f. Melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, pengadaan tanah untuk fasilitas publik, dan program unggulan lainnya.
- g. Belanja Pegawai untuk kebutuhan honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan pegawai Honor Daerah selama 13 (tiga belas) bulan.

Kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap pola distribusi belanja masing-masing OPD dimana pengalokasian belanja dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Menetapkan besaran kebutuhan seluruh komponen Belanja Tidak langsung yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga.
2. Menetapkan besaran kebutuhan program-program unggulan dan program aspirasi.
3. Menetapkan besaran kebutuhan dana pendamping/sharing pembiayaan atas diterimannya Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah.
4. Menetapkan besaran dan alokasi kebutuhan program yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Pajak Rokok, Dana PAD Kota



Mataram.

5. Menetapkan kebutuhan dan besaran belanja minimum setiap OPD serta diupayakan untuk efisien dan rasional untuk alokasi belanja operasional OPD

Adapun realisasi dan proyeksi belanja daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2014-2018 dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Mataram Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Proyeksi/Target Tahun 2017	Proyeksi/Target Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7
2	BELANJA	1.044.355.803.030,95	1.188.648.514.333,19	387.450.880.713,36	1.475.325.788.557,67	1.618.982.450.399,91
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	543.564.076.968,50	589.492.898.964,00	239.247.961.141,00	679.442.394.575,00	724.735.167.110,50
2.1.1	Belanja Pegawai	506.848.621.240,50	532.875.067.509,00	226.204.011.467,00	584.927.960.046,00	610.954.406.314,50
2.1.2	Belanja Hibah	17.975.572.877,00	31.434.939.230,00	6.510.424.625,00	58.353.671.936,00	71.813.038.289,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	18.370.110.351,00	21.446.429.500,00	5.870.925.000,00	27.599.067.798,00	30.675.386.947,00
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan	-	636.049.460,00	-	-	-
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	369.772.500,00	3.100.413.265,00	662.600.049,00	8.561.694.795,00	11.292.335.560,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	500.791.726.062,45	599.155.615.369,19	148.202.919.572,36	795.883.393.982,67	894.247.283.289,41
2.2.1	Belanja Pegawai	67.103.151.958,00	75.157.077.198,00	25.760.302.890,00	91.264.927.678,00	99.318.852.918,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	201.856.194.367,45	248.611.261.850,19	81.883.262.614,36	342.121.396.815,67	388.876.464.298,41
2.2.3	Belanja Modal	231.832.379.737,00	275.387.276.321,00	40.559.354.068,00	362.497.069.489,00	406.051.966.073,00

Sumber: Proyeksi

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang



dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan Pemerintah kota Mataram pada tahun 2017 diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan *Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya* untuk menutup defisit APBD.

Untuk pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis mendukung program-program prioritas Kota Mataram.

Adapun realisasi dan proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Mataram untuk Tahun Anggaran 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.6
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kota Mataram Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Proyeksi/Target Tahun 2017	Proyeksi/Target Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN DAERAH	97.119.606.936,51	118.714.370.490,80	88.961.117.271,01	127.793.590.858,51	133.343.764.509,99
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	79.789.606.936,51	101.214.370.490,80	83.961.117.271,01	98.710.590.858,51	99.190.364.509,99
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	79.789.606.936,51	101.214.370.490,80	83.961.117.271,01	98.710.590.858,51	99.190.364.509,99
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	17.330.000.000,00	17.500.000.000,00	5.000.000.000,00	29.083.000.000,00	34.153.400.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	17.330.000.000,00	17.500.000.000,00	5.000.000.000,00	29.083.000.000,00	34.153.400.000,00

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2016



BAB IV

PRIORITAS *dan* SASARAN PEMBANGUNAN

Bagian ini memuat uraian tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2018 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016 dan target yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2017, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan dalam Tahun 2018.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Acuan yang menjadi dasar serta kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia yaitu Millenium Development Goals (SDG's) telah berakhir pada tahun 2015, dan sebagai kelanjutannya para pemimpin dunia sepakat untuk melanjutkan apa yang telah digariskan dalam MDG's tersebut sehingga muncul sebuah konsep baru yaitu Sustainable Development Goal's (SDG's) yang melanjutkan cita-cita mulia MDG's konsen menanggulangi kelaparan dan kemiskinan di dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka agenda baru perkotaan di Indonesia akan mengikuti konsep SDG's sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs.

SDG's atau Pembangunan berkelanjutan (2016-2030) terdiri dari 3 (tiga) dimensi utama yang diturunkan menjadi 17 tujuan yang mempunyai implikasi atau keterkaitan dengan pengelolaan perkotaan. Adapun pemetaan dimensi utama dan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka SDG's dapat dilihat sebagai berikut:

A. Pembangunan Manusia (*Human Development*), dengan tujuan pembangunan sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua tempat;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan;



3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

B. Pembangunan Sosial Ekonomi (*Social Economic Development*), dengan tujuan pembangunan sebagai berikut:

1. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
2. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
3. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
4. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

C. Pembangunan Berbasis Lingkungan (*Environmental Development*), dengan tujuan pembangunan sebagai berikut:

1. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air yang berkelanjutan dan sanitasi untuk semua;
2. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
3. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
4. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
5. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
6. Melestarikan dan berkelanjutan dalam pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;



7. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

4.1.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional seperti yang secara mutlak tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Makna dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional hingga skala daerah.

Visi Pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang merupakan tahapan ketiga dari RPJPN 2005-2025 adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan Visi adalah melalui penerapan 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.



7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan Visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” tersebut, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro.
 - a. Pembangunan manusia dan masyarakat
 - b. Ekonomi Makro
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
 - a. Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - b. Pendidikan
 - c. Kesehatan
 - d. Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - e. Perlindungan Anak
 - f. Pembangunan Masyarakat
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan.
 - a. Kedaulatan Pangan
 - b. Kedaulatan Energi
 - c. Maritim dan Kelautan
 - d. Pariwisata dan Industri Manufaktur
 - e. Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
4. Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan.
 - a. Menurunkan Kesenjangan Antar Kelompok Ekonomi
 - b. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Dasar dan Akses terhadap Ekonomi Produktif Masyarakat Kurang Mampu
5. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah.
 - a. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah
6. Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
 - a. Politik dan Demokrasi
 - b. Penegakan Hukum
 - c. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
 - d. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah
 - e. Pertahanan dan Keamanan



Untuk menunjukkan prioritas menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi serta berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan 9 (Sembilan) agenda prioritas yang disebut dengan NAWA CITA, yang meliputi:

- Cita 1 :** Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- Cita 2 :** Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- Cita 3 :** Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- Cita 4 :** Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- Cita 5 :** Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- Cita 6 :** Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- Cita 7 :** Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- Cita 8 :** Melakukan revolusi karakter bangsa.
- Cita 9 :** Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

Selanjutnya Sembilan cita-cita (Nawa Cita) tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yaitu: 1) Norma Pembangunan; 2) Tiga Dimensi Pembangunan; 3) Kondisi Perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta 4) Program-program Quick Wins.

Secara umum, Strategi Pembangunan Nasional ditunjukkan dalam Gambar 4.1 di bawah ini:

Gambar 4.1.
Strategi Pembangunan Nasional



Strategi Pembangunan Nasional tersebut menggariskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
 - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memberikan perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah.
 - c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi Pembangunan
 - a. Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat
 - b. Dimensi Pembangunan Sector Unggulan
 - c. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan
3. Kondisi sosial, politik, hukum dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas.



4. *Quickwins*, yaitu hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Keterkaitan antara Dimensi Pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Dimensi Pembangunan Manusia** dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar; sektor kesehatan dengan melaksanakan Program Indonesia Sehat; perumahan rakyat; melaksanakan revolusi karakter bangsa; memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia; dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita (Agenda Pembangunan Nasional – RPJMN 2015-2019).
- b. **Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan** dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan iptek. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.
- c. **Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayah** dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.
- d. **Kondisi Perlu** yang memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi perlu ini merupakan penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat.

Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sector-sector yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah.

Berbeda dengan RKP sebelumnya yang memiliki 23 prioritas nasional, pada RKP 2018, Kementerian PPN/Bappenas memangkas prioritas nasional agar lebih



fokus menjadi 10 prioritas nasional, antara lain: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) perumahan dan pemukiman; (4) pengembangan dunia usaha dan pariwisata; (5) ketahanan energi; (6) ketahanan pangan; (7) penanggulangan kemiskinan; (8) infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman; (9) pembangunan wilayah; dan (10) politik, hukum, dan pertahanan keamanan

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tekad dan semangat mengurangi kesenjangan antar daerah dan memajukan daerah menjadi sendi utama dalam merumuskan tujuan, arah kebijakan dan strategis, serta prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah di setiap wilayah. Arah pengembangan wilayah dalam RPJMN 2015-2019 terbagi menjadi tujuh wilayah pembangunan, yaitu: Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa-Bali, dan Wilayah Sumatera. Pengembangan wilayah didasarkan pada potensi keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah, serta posisi geografis strategis di masing-masing pulau. Pembangunan Kota Mataram termasuk dalam arah pengembangan wilayah ketiga yaitu Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dengan tema pengembangan wilayah sebagai:

1. Pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan Industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE);
2. Penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut;
3. Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung;
4. Pengembangan industri pangan dan tembaga.

Tujuan pengembangan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan pariwisata ekologis, serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, pangan, dan tembaga, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.



Adapun sasaran pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah;
2. Mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dengan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran outcome yang diharapkan adalah meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, menurunnya persentase penduduk miskin, meningkatnya IPM di daerah tertinggal;
3. Mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Nusa Tenggara dengan mengusulkan pembangunan 1 kawasan perkotaan metropolitan yang berperan sebagai PKN dan sebagai *buffer* urbanisasi;
4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya kemiskinan dan pengangguran di desa-desa tertinggal dan mempercepat pembangunan ekonomi menuju desa mandiri;
5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota dengan memperkuat sedikitnya 5 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
6. Mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halamandepan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman dengan pengembangan 3 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan;
7. Otonomi Daerah;
8. Sasaran Penanggulangan Bencana di Wilayah Nusa Tenggara dengan mengurangi indeks resiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK maupun kawasan pusat pertumbuhan lainnya.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Mataram sebagaimana yang tercantum dalam dokumen ini merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021 yang telah disusun. Tujuan merupakan suatu kondisi ideal yang ingin dicapai pada akhir periode dimana upaya pencapaiannya dilakukan dengan memenuhi sasaran-sasaran yang telah ditentukan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Mataram disusun dalam kerangka yang jelas berdasarkan visi Kota Mataram tahun 2016-2021 yaitu :**“Terwujudnya**



Kota Mataram Yang Maju, Religius Dan Berbudaya”. Visi ini kemudian dituangkan ke dalam 5 misi yaitu untuk:

1. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Rukun dan Damai.
2. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek Dalam Rangka Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing.
3. Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera.
4. Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

Hubungan dan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Mataram dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1		
Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, rukun dan damai	1. Meningkatkan kualitas pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat	a. Tersedianya sarana penunjang kebudayaan yang memadai b. Tersedianya budayawan yang kompeten
	2. Meningkatkan Kondusifitas wilayah	a. Tertanganinya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif b. Terwujudnya kerukunan hidup masyarakat yang optimal
	3. Meningkatkan religiusitas masyarakat	a. Tersedianya sarana penunjang kehidupan beragama yang memadai b. Tersedianyan tenaga keagamaan yang berkualitas
		c. Tersalurannya dana dan dukungan kepada tenaga syiar dan lembaga keagamaan yang proporsional
4. Meningkatkan kualitas masyarakat	a. Terbinanya masyarakat secara berkelanjutan	
Misi 2		
Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan	a. Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memadai
		b. Tersedianya SDM pendidikan yang sesuai



Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya			
MISI	TUJUAN	SASARAN	
Manusia Melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek Dalam Rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing		kompetensi secara merata	
	2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan	a. Tersedianya sarana prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang memadai b. Tersedianya kualitas SDM kesehatan yang profesional c. Tersedianya standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu
	3.	Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan catatan sipil	a. Tersedianya prasarana dan layanan kependudukan yang memadai b. Terwujudnya layanan kependudukan yang berkualitas
	4.	Meningkatkan kualitas perempuan dan kesetaraan gender	a. Terwujudnya kesetaraan gender secara menyeluruh b. Terbinanya kelembagaan perempuan secara berkelanjutan
	5.	Meningkatkan kualitas kesejahteraan dan perlindungan anak	a. Tertanganinya permasalahan anak sesuai situasi b. Terwujudnya layanan yang berkualitas bagi anak
	6.	Meningkatkan efektifitas pengendalian pertumbuhan penduduk	a. Tertanganinya laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan b. Terwujudnya keluarga yang berkualitas
	7.	Meningkatkan kualitas layanan social masyarakat	a. Tertanganinya masalah social kemasyarakatan secara berkelanjutan b. Terdatanya penduduk miskin sesuai kondisi
	8.	Meningkatkan kapasitas pemuda	a. Terbinanya kelembagaan pemuda secara berkelanjutan
	9.	Meningkatkan produktifitas prestasi olahraga	a. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai b. Tersedianya dana pembinaan olahraga yang memadai
	10	Meningkatkan kualitas data dan informasi	a. Tersedianya sarana pendukung yang memadai b. Tersedianya sistem data yang terpadu
	11	Meningkatkan kualitas layanan arsip	a. Tersedianya sarana prasarana kearsipan yang memadai b. Terpenuhinya SDM layanan arsip sesuai kebutuhan c. Terpenuhinya sistem pengelolaan arsip yang terpadu
	12	Meningkatkan kualitas sarana perpustakaan	a. Tersedianya sarana prasarana perpustakaan yang memadai b. Terpenuhinya SDM layanan perpustakaan yang memadai
Misi 3			
Mendorong kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal dalam rangka mewujudkan	1	Meningkatkan efektifitas layanan ketenagakerjaan	a. Tersedianya tenaga kerja yang berkompeten b. Terlindunginya tenaga kerja sesuai ketentuan c. Tersedianya informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi
	2	Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	a. Terbentuknya kelembagaan koperasi yang profesional b. Tersedianya SDM yang berkompeten c. Terwujudnya akses permodalan



Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya			
MISI	TUJUAN	SASARAN	
masyarakat yang sejahtera	3 Meningkatkan stabilitas ketersediaan stock dan distribusi komoditas strategis	a. Tersedianya kelembagaan yang mantap	
		b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	
		c. Tersedianya SDM yang berkompeten	
	4 Meningkatkan produktifitas pertanian	a. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian yang representatif	
	5 Meningkatkan aminitas wisatawan	a. Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif	
		b. Tersedianya data/informasi yang memadai	
		c. Terdidiknya pelaku wisata yang profesional	
		d. Terpeliharanya situasi keamanan secara menyeluruh	
	6 Meningkatkan produktifitas perikanan	a. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	
		b. Tersedianya sumberdaya perikanan	
		c. Terlatihnya sumberdaya petani/nelayan yang terampil	
		d. Tersedianya modal usaha yang memadai	
	7 Meningkatkan stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok	a. Terwujudnya masyarakat yang paham tentang perkembangan harga komoditas	
		b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	
		c. Tersedianya tim pengamanan dan pengawasan peredaran barang dan jasa yang berkompeten	
	8 Meningkatkan kualitas industri kecil menengah	a. Tersedianya pelaku IKM yang berdaya saing	
		b. Tersedianya permodalan usaha	
		c. Tersedianya sarana produksi yang memadai	
		d. Tersedianya dana bantuan secara stimulan	
	9 Meningkatkan efektifitas layanan perijinan	a. Tersedianya SDM penanaman modal yang handal	
		b. Tersedianya sistem pelayanan yang tepat	
		c. Tersedianya regulasi layanan perijinan yang proporsional	
	Misi 4		
	Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui penanganan sarana dan prasarana perkotaan yang berbasis tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman	a. Tersedianya regulasi pengelolaan air limbah yang komprehensif
			b. Tersedianya lembaga pengelolaan air limbah
			c. Tersedianya lahan sarana pengolah air limbah yang memadai
			d. Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang memadai
e. Tersedianya akses air bersih secara merata			
f. Tersedianya regulasi pengelolaan sampah yang komprehensif			
g. Tersedianya lembaga pengelolaan sampah secara berjenjang			
h. Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang memadai			
i. Terbentuknya TPA regional yang optimal			



Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		j. Terkelolanya sampah berbasis energi terbarukan yang berkualitas
		k. Tertanganinya permasalahan banjir dan genangan secara optimal
	2 Meningkatkan aksesibilitas wilayah	a. Tersedianya jaringan jalan dan jembatan sesuai standar
		b. Tersedianya fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan nyaman
	3 Meningkatkan efektifitas jaringan irigasi	a. Terpeliharanya jaringan irigasi yang optimal
	4 Meningkatkan kapasitas pengawasan jasa konstruksi	a. Terwujudnya kualitas jasa konstruksi yang sesuai standar
	5 Meningkatkan aksesibilitas perumahan dan permukiman layak huni	a. Tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara menyeluruh
		b. Tertanganinya rumah tidak layak huni secara menyeluruh
		c. Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai
	6 Meningkatkan aminitas pengguna jalan	a. Tersedianya sistem transportasi publik yang memadai
		b. Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai
		c. Terpasangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan (road safety) secara menyeluruh
		d. Terkelolanya perparkiran secara optimal
	7 Meningkatkan efektifitas penataan ruang	a. Terwujudnya perencanaan tata ruang yang berkualitas
		b. Terwujudnya pemanfaatan ruang secara tertib sesuai prosuder
		c. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sejalan dengan peraturan
	8 Meningkatkan efektifitas pengelolaan tanah milik daerah	a. Terkelolanya aset milik daerah secara tertib sesuai prosedur
	9 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	a. Tertanganinya pencemaran lingkungan hidup secara menyeluruh
		b. Tercapainya luasan ruang terbuka hijau publik dan privat sejalan dengan peraturan
		c. Terwujudnya kesiapsiagaan kebencanaan pada wilayah rawan bencana
		d. Tertatanya layanan komunikasi dan informatika yang berkualitas
Misi 5		
Meningkatkan keandalan pelayanan public melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik	1 Meningkatkan kualitas layanan publik	a. Tersedianya sarana prasarana pemerintah yang memadai
		b. Tercapainya target penerimaan PAD
		c. Terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel
		d. Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai



Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya		
MISI	TUJUAN	SASARAN
(good governance)	2 Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	a. Tertatanya birokrasi pemerintahan
		b. Terwujudnya system pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel
		c. Terwujudnya system administrasi pembangunan yang tertib dan terkendali
		d. Tersedianya SDM yang profesional
		e. Tersedianya regulasi daerah sesuai kebutuhan
		f. Terpenuhinya laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien
		g. Terpenuhinya struktur kelembagaan yang proporsional
		h. Terbinanya SDM Aparatur secara berkelanjutan
		i. Terpenuhinya regulasi sesuai kebutuhan
	3 Meningkatkan kualitas rencana pembangunan	a. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang akurat dan akuntabel
		b. Tersedianya data penunjang yang valid dan berkualitas
		c. Terjalannya Kerjasama dan Kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan Pembangunan
		d. Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

Dari tabel di atas, hubungan dan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dideskripsikan dengan jelas sebagai berikut ini:

A. Misi I :Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai agama dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, rukun dan damai.

Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualitas pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat, meningkatkan kondusifitas wilayah, meningkatkan religiusitas masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat dengan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Tersedianya sarana penunjang kebudayaan yang memadai;
2. Tersedianya budayawan yang kompeten;
3. Tertanganinya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif;
4. Terwujudnya kerukunan hidup masyarakat yang optimal;
5. Tersedianya sarana penunjang kehidupan beragama yang memadai;
6. Tersedianya tenaga keagamaan yang berkualitas;
7. Tersalurkanya dana dan dukungan kepada tenaga syiar dan lembaga keagamaan yang proporsional;
8. Terbinanya masyarakat secara berkelanjutan.



B. Misi II :Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pemenuhan pelayanan sosial dasar dan penguasaan iptek dalam rangka mewujudkan daerah yang berdaya saing.

Hal ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Mataram terutama kebutuhan akan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia menuju daerah yang berdaya saing, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
2. Tersedianya SDM pendidikan yang sesuai kompetensi secara merata;
3. Tersedianya sarana prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang memadai;
4. Tersedianya kualitas SDM kesehatan yang professional;
5. Tersedianya standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu;
6. Tersedianya prasarana dan layanan kependudukan yang memadai;
7. Terwujudnya layanan kependudukan yang berkualitas;
8. Terwujudnya kesetaraan gender secara menyeluruh;
9. Terbinanya kelembagaan perempuan secara berkelanjutan;
10. Tertanganinya permasalahan anak sesuai situasi;
11. Terwujudnya layanan yang berkualitas bagi anak;
12. Tertanganinya laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan;
13. Terwujudnya keluarga yang berkualitas;
14. Tertanganinya masalah sosial kemasyarakatan secara berkelanjutan;
15. Terdatanya penduduk miskin sesuai kondisi;
16. Terbinanya Kelembagaan Pemuda secara berkelanjutan;
17. Tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai;
18. Tersedianya dana pembinaan olahraga yang memadai;
19. Tersedianya sarana pendukung yang memadai;
20. Tersedianya sistem data yang terpadu;
21. Tersedianya sarana prasarana kearsipan yang memadai;
22. Terpenuhinya SDM Layanan Arsip sesuai kebutuhan
23. Terpenuhinya sistem pengelolaan arsip yang terpadu
24. Tersedianya sarana prasarana perpustakaan yang memadai
25. Terpenuhinya SDM Layanan Perpustakaan yang memadai



C. Misi III :Mendorong kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Hal ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan mendorong kemajuan ekonomi daerah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi-potensi lokal, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Tersedianya tenaga kerja yang berkompeten;
2. Terlindunginya tenaga kerja sesuai ketentuan;
3. Tersedianya informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi;
4. Terbentuknya kelembagaan koperasi yang professional;
5. Tersedianya SDM yang berkompeten;
6. Terwujudnya akses permodalan;
7. Tersedianya kelembagaan yang mantap;
8. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
9. Tersedianya SDM yang berkompeten;
10. Tersedianya lahan budidaya yang memadai;
11. Tersedianya sarana dan prasarana yang representative;
12. Tersedianya Data/Informasi yang memadai;
13. Terdidiknya Pelaku Wisata yang Profesional;
14. Terpeliharanya situasi keamanan secara menyeluruh;
15. Tersedianya Sarana Prasarana Yang Memadai;
16. Tersedianya Sumberdaya Perikanan;
17. Terlatihnya Sumberdaya Petani/Nelayan yang Terampil;
18. Tersedianya modal usaha yang memadai;
19. Terwujudnya masyarakat yang paham tentang perkembangan harga komoditas;
20. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
21. Tersedianya Tim Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa yang berkompeten;
22. Tersedianya pelaku IKM yang berdaya saing;
23. Tersedianya permodalan Usaha;
24. Tersedianya Sarana Produksi yang memadai;
25. Tersedianya dana bantuan secara simultan;



26. Tersedianya SDM penanaman modal yang handal;
27. Tersedianya sistem pelayanan yang tepat;
28. Tersedianya regulasi layanan perijinan yang proporsional.

D. Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui penanganan sarana dan prasarana perkotaan berbasis tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kelayakan hidup masyarakat Kota Mataram melalui pemenuhan sarana dan prasarana perkotaan yang berbasis tata ruang, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Tersedianya regulasi pengelolaan air limbah yang komprehensif;
2. Tersedianya lembaga pengelolaan air limbah yang terstruktur;
3. Tersedianya lahan sarana pengolah air limbah yang memadai;
4. Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang memadai;
5. Tersedianya akses air bersih secara merata;
6. Tersedianya regulasi pengelolaan sampah yang komprehensif;
7. Tersedianya lembaga pengelolaan sampah secara berjenjang;
8. Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang memadai;
9. Terbentuknya TPA regional yang optimal;
10. Terkelolanya sampah berbasis energi terbarukan yang berkualitas;
11. Tertanganinya permasalahan banjir dan genangan secara optimal;
12. Tersedianya jaringan jalan dan jembatan sesuai standar;
13. Tersedianya fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan nyaman;
14. Terpeliharanya jaringan irigasi yang optimal;
15. Terwujudnya kualitas jasa konstruksi yang sesuai standar;
16. Tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara menyeluruh;
17. Tertanganinya rumah tidak layak huni secara menyeluruh;
18. Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai;
19. Tersedianya sistem transportasi publik yang memadai;
20. Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai;
21. Terpasangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan (road safety) secara menyeluruh;
22. Terkelolanya perparkiran secara optimal;
23. Terwujudnya perencanaan tata ruang yang berkualitas;



24. Terwujudnya pemanfaatan ruang secara tertib sesuai prosuder;
25. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sejalan dengan peraturan;
26. Terkelolanya aset milik daerah secara tertib sesuai prosedur;
27. Tertanganinya pencemaran lingkungan hidup secara menyeluruh;
28. Tercapainya luasan ruang terbuka hijau publik dan privat sejalan dengan peraturan;
29. Terwujudnya kesiapsiagaan kebencanaan pada wilayah rawan bencana;
30. Tertatanya layanan komunikasi dan informatika yang berkualitas.

E. Meningkatkan keandalan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)

Hal ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi yang ditandai dengan adanya perbaikan keandalan pelayanan publik di semua lini secara cepat, tepat, murah, transparan dan akuntabel, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Tersedianya sarana prasarana pemerintah yang memadai;
2. Tercapainya target penerimaan PAD;
3. Terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel;
4. Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai;
5. Tertatanya birokrasi pemerintahan;
6. Terwujudnya system pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel;
7. Terwujudnya system administrasi pembangunan yang tertib dan terkendali;
8. Tersedianya SDM yang professional;
9. Tersedianya regulasi daerah sesuai kebutuhan ;
10. Terpenuhinya laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien;
11. Terpenuhinya struktur kelembagaan yang proporsional;
12. Terbinanya SDM Aparatur secara berkelanjutan;
13. Terpenuhinya regulasi sesuai kebutuhan;
14. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang akurat dan akuntabel;
15. Tersedianya data penunjang yang valid dan berkualitas;
16. Terjalannya Kerjasama dan Kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan Pembangunan;
17. Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.



4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada tahun 2018 dirancang sebagai keberlanjutan upaya yang telah dilakukan dan dimulai sejak tahun 2016. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2018 yaitu **“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan pemerataan”**.

Berdasarkan tema tersebut, Penyusunan RKP tahun 2018 dilakukan dengan Perkuatan pelaksanaan kebijakan *Money Follow Program* melalui pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Lebih jauh pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang memuat antara lain:

- Perkuatan kendali program. Perencanaan pendanaan dilakukan pada prioritas pembangunan hingga tingkat pelaksanaan (keluaran dan lokus yang jelas)
- Pengintegrasian sumber – sumber pendanaan baik belanja pusat (K/L dan Non K/L), transfer ke daerah maupun non APBN
- Memperkuat koordinasi antar instansi dan antar pusat daerah dengan memfokuskan pembahasan pada prioritas pembangunan agar :
 - ✓ Kesiapan pelaksanaan program dibahas sejak awal
 - ✓ Integrasi antar program dan antar pelaku pembangunan
- Mengintegrasikan dokumen perencanaan, dokumen anggaran serta penilaian kinerja dalam sebuah rangkaian sistem yang terpadu (KRISNA)

Asumsi Ekonomi Makro yang diskenariokan pada Tahun 2018 yaitu:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 - 6,1 persen dengan asumsi kondisi perekonomian dunia membaik pada tahun 2018 meskipun masih dihadapkan pada beberapa resiko global seperti kebijakan menyoeter AS dan Trump, ketidakpastian Brexit, pengetatan kebijakan makroekonomi di China, menurunnya produktifitas di Negara-negara maju, melambannya harga komoditas, serta kondisi geopolitik dan ancaman terorisme. Adapun rincian asumsi perekonomian nasional adalah sebagai berikut:
 - a. Sisi Produksi:



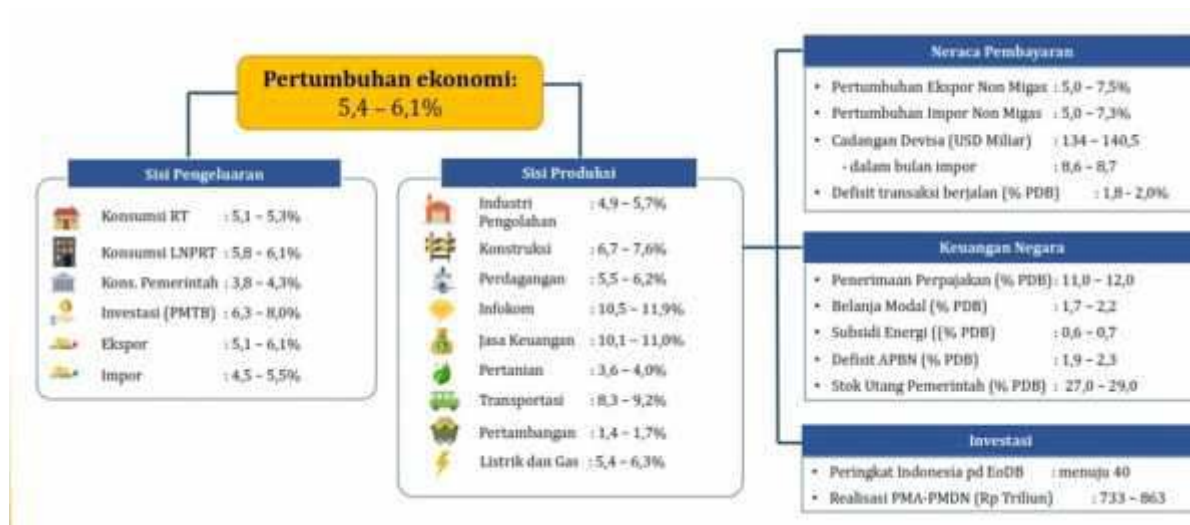
- Sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan yaitu : sektor Industri pengolahan terutama non migas; pertanian; Perdagangan; Informasi dan komunikasi; Konstruksi; dan Jasa keuangan. Pada sektor Konstruksi, peningkatan pembangunan konstruksi diutamakan untuk sektor ketenagalistrikan serta program pembangunan infrastruktur pemerintah untuk konektivitas dan perumahan/pemukiman. Pada sektor perdagangan dan industri, peningkatan aktivitas industri pengolahan yang mendorong penyediaan pasokan dan distribusi pemasaran. Selain itu peningkatan konsumsi rumah tangga akan mendorong aktivitas perdagangan, serta peningkatan ekspor impor akan mendorong aktivitas ekspedisi dan distribusi. Pada sektor ini juga mengandalkan kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan usaha dan wirausaha baru. Pada sektor Informasi dan Komunikasi, diarahkan pada perluasan jaringan 4G dan 4,5G dengan operasionalisasi dan pembangunan fiber optic nasional (palapa ring). Pada sektor Jasa Keuangan, diarahkan pada pengembangan keuangan inklusif (perluasan pemanfaatan inovasi teknologi), peningkatan penetrasi layanan keuangan di desa dan kota (branchless banking perluasan penggunaan tabungan, serta pembiayaan mikro dan asuransi mikro), serta edukasi keuangan dan perlindungan konsumen keuangan.
 - Sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah: Industri pengolahan; Pertanian; dan Pariwisata.
- b. Sisi Pengeluaran dengan rincian pertumbuhan pada tahun 2018 tiap komponen sebagai berikut:
- Komponen Konsumsi Rumah Tangga pada kisaran 5,1 - 5,3 persen dengan asumsi peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja baru karena aktivitas ekonomi yang lebih baik. Oleh karenanya kebijakan diarahkan pada upaya untuk menjaga meningkatkan daya beli masyarakat dengan cara meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang layak; fasilitasi pengembangan Usaha Mikri Kecil Menengah (UMKM); pengendalian harga terutama harga barang-barang kebutuhan pokok; serta; subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin.



- Komponen Investasi (PMTB) pada kisaran 6,3 - 8 persen dengan asumsi investasi swasta semakin meningkat dengan dorongan kebijakan diarahkan pada deregulasi peraturan; perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan terutama di daerah; percepatan fasilitasi masalah investasi; pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi; perbaikan iklim tenaga kerja; dan; peningkatan pertumbuhan kredit dan restrukturisasi NPL. Sedangkan dari sisi optimalisasi investasi pemerintah diarahkan pada kegiatan-kegiatan prioritas serta penyiapan program/kegiatan secara lebih baik.
- Komponen konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) sebesar 5,8 – 6,1 persen diarahkan pada kegiatan dua event besar yaitu Asian Games dan World Bank / International Monetary Fund (IMF) meeting, serta pilkada serentak di 171 daerah.
- Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 3,8 – 4,3 persen. Konsumsi pemerintah akan relatif terbatas seiring ruang fiskal yang sempit, dan prioritas pada alokasi belanja modal.
- Ekspor sebesar 5,1 – 6,1 persen. Kinerja Ekspor masih terbatas seiring dengan terbatasnya perbaikan ekonomi dan perdagangan global serta kenaikan harga komoditas. Namun ekspor jasa akan meningkat, terutama didorong oleh peningkatan pariwisata; dan juga ekspor nonmigas yang didorong oleh upaya diversifikasi ekspor serta pendalaman pasar yang sudah ada.
- Impor sebesar 4,5 – 5,5 persen. Impor akan didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Gambar 4.2

Sasaran Ekonomi Makro Nasional 2018



Sumber: Paparan Bappenas, 2017

2. Laju inflasi $3,5 \pm 1$ persen;
3. Nilai tukar (USD/IDR) Rp.13.500 – 13.800
4. Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price / ICP) 45 - 60 USD/Barrel;
5. Lifting minyak 771 - 815 ribu barrel/hari;
6. Lifting Gas 1.194 – 1.235 BOE/hari.
7. Angka Pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 5,1 - 5,4 persen, dengan asumsi jumlah angkatan kerja baru kurang dari 2 juta dengan kesempatan kerja baru tercipta sekitar 2,3 – 2,5 juta. Peningkatan investasi dan anggaran lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, untuk dapat menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Industri padat karya akan menampung penganggur sehingga memperkecil kesenjangan dan mengangkat penduduk dari garis kemiskinan. Sektor jasa juga menjadi andalan untuk menyediakan lapangan kerja formal, terutama kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi.

Grafik 4.1



Sumber: Paparan Bappenas, 2017

8. Tingkat Kemiskinan ditargetkan pada kisaran 9 – 10 % dengan asumsi disamping pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang sesuai target, harga komoditas bahan makanan stabil serta program-program afirmasi pengurangan kemiskinan tepat sasaran dan tepat waktu. Penajaman program pada tahun 2018 diarahkan pada penggunaan basis data untuk semua program perlindungan sosial, perluasan konversi beras sejahtera menjadi layanan non-tunai di seluruh kota dan sebagian besar kabupaten, penyaluran subsidi energy dan LPG-3kg non tunai, perluasan program keluarga harapan (PKH) dengan memenuhi persyaratan (CCT) dan memperbaiki sistem informasi (MIS), serta memaksimalkan jangkauan pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi layak dan identitas kependudukan.

Grafik 4.2



* APBN 2017

Sumber: Paparan Bappenas, 2017

9. Rasio ketimpangan tau Gini Rasio nasional pada tahun 2018 diperkirakan menurun menjadi 0,38 dengan asumsi adanya pengurangan tingkat konsumsi perkapita pada kelompok ekonomi 20% paling atas. Sementara, kelompok menengah mulai mengalami kenaikan meskipun kecil. Sedangkan, kelompok 40% terbawah masih belum mengalami kenaikan. Oleh karena itu, kebijakan tahun 2018 diarahkan pada pengutan kebijakan fiscal dalam redistribusi pendapatan yang lebih berkeadilan, dan pelaksanaan program-program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 40% ke bawah merupakan prioritas.

Grafik 4.3



* APBN 2017

Sumber: Paparan Bappenas, 2017

Skenario target nasional diatas disusun dengan asumsi terjadi perbaikan ekonomi global dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi peningkatan harga minyak dunia yang lebih tinggi dari target dapat berdampak positif terhadap penerimaan namun juga dapat menimbulkan tekanan bagi kenaikan inflasi nasional.

Selain itu, berdasarkan tema tersebut maka dalam RKP tahun 2018 ditentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang dituangkan ke dalam Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas tahun 2018 yaitu:

1. Pendidikan

1. Pendidkan Vokasi
2. Peningkatan kualitas guru

2. Kesehatan

3. Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

3. Perumahan dan Permukiman

6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi;

4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata:



8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
11. Perbaikan iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi.

5. Ketahanan Energi:

13. EBT dan Konservasi Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi

6. Ketahanan Pangan:

15. Peningkatan Produksi Pangan
16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)

7. Penanggulangan Kemiskinan:

17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi.

8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman:

20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika.

9. Pembangunan Wilayah:

22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan
24. Reforma Agraria
25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
26. Percepatan Pembangunan Papua.

10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan:

27. Penguatan Pertahanan
28. Stabilitas Politik dan Keamanan
29. Kepastian Hukum
30. Reformasi Birokrasi.

serta satu prioritas khusus untuk pelaksanaan Asian Games dan Para Asian Games.

Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertuang Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, yaitu “**Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing, dan Sejahtera**”.



Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) misi yaitu:

1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter;
2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal;
3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan;
4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah;
6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang;
7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Adapun prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan untuk tahun 2013-2018, yaitu:

1. Budipekerti luhur;
2. Reformasi Birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan stabilitas keamanan;
3. Kesehatan;
4. Pendidikan;
5. Kesejahteraan sosial;
6. Agroindustri dan ketahanan pangan;
7. Wirausaha dan iklim investasi;
8. Pariwisata dan ekonomi kreatif;
9. Infrastruktur dan konektivitas wilayah;
10. Lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam.

Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2018 yang telah ditetapkan adalah “Menanggulangi Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan, Memantapkan Infrastruktur dan Memacu Investasi yang Berkelanjutan”, adapun isu strategis pembangunan Provinsi NTB tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan Angka Kemiskinan
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Investasi Berkelanjutan

Menelaah pencapaian target Nasional dan Provinsi, maka prioritas pembangunan Kota Mataram tahun 2018 diarahkan untuk mendukung pencapaian



target pembangunan Nasional dan Provinsi NTB yaitu pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Mataram dalam upaya sinkronisasi dan integrasi pembangunan Nasional dan Provinsi NTB, menetapkan arah dan prioritas pembangunan tahun 2018 dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019, Rancangan RKP 2018, RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018, Rancangan RKPD Provinsi NTB tahun 2018, RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 dan RPJP Kota Mataram tahun 2005-2025.

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan lima tahun ketiga, maka prioritas pembangunan Kota Mataram tahun 2016-2021 ditujukan untuk:

1. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan yang diikuti dengan kesinambungan pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang ditandai dengan:
 - a. terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata pada seluruh wilayah, baik dalam hal kuantitas dan kualitas sehingga menciptakan suasana lingkungan perkotaan yang sehat, bersih dan nyaman;
 - b. tertatanya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain dengan mempertahankan sistem jaringan jalan yang tersedia sehingga dapat memacu percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat;
 - c. terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan;
 - d. terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern;
 - e. terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air;
 - f. optimalisasi pemanfaatan dan penataan ruang kota agar dapat terwujudnya penataan dan pola pemanfaatan ruang yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta tercapainya keseimbangan dalam pemanfaatan ruang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lahan dan tercapainya prinsip pembangunan berkelanjutan;



- g. meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan (makam berbasis taman) yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatnya pelayanan dan pengendalian kebersihan lingkungan perkotaan agar terwujudnya kondisi lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sehat, serta untuk mendukung pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Kesejahteraan rakyat terus membaik seiring meningkatnya kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanding dengan daerah-daerah maju lainnya, yang ditandai dengan:
- a. tersedianya lembaga pendidikan yang merata dan seimbang di seluruh wilayah dengan fasilitas memadai, termasuk bagi anak berkelainan fisik dan mental;
 - b. meningkatnya peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam bidang pendidikan formal dan non formal;
 - c. membaiknya manajemen lembaga pendidikan yang mendorong otonomi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
 - d. meningkatnya kapasitas dan kapabilitas penguasaan iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek;
 - e. meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat serta terwujudnya pola hidup bersih dan sehat sebagai antisipasi terhadap penyakit menular dan kejadian luar biasa;
 - f. meningkatnya kesetaraan gender;
 - g. meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - h. meningkatnya profesionalisme aparaturnya daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, (efisien dan efektif) serta profesional (*good governance*) yang mampu mendukung pembangunan.
3. Daya saing perekonomian yang didukung Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) dan ekonomi lokal yang semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya dukungan SDM yang handal, infrastruktur yang modern (dan moda transportasi yang memadai), iklim usaha yang kondusif, serta kelembagaan



ekonomi yang efisien, produktif, pemanfaatan dan penerapan teknologi oleh seluruh pelaku ekonomi. Kondisi ini ditandai dengan:

- a. meningkatnya daya saing produk industri dan jasa dengan daerah lain dalam rangka memasuki era globalisasi;
- b. meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita dan rendahnya atau menurunnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin;
- d. terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri kerajinan yang berdaya saing global, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing (Sektor pertanian dengan penguasaan teknologi maju dengan pengaturan sisa lahan yang tersedia. Sektor pariwisata yang bisa menunjang ekonomi masyarakat).

Berdasarkan evaluasi capaian pembangunan tahun 2016, perkiraan tahun 2017 dan tantangan maupun target tahun 2018 serta diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2018 dan Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2018, maka Tema Pembangunan Kota Mataram tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam MPBM RKPD Kota Mataram Tahun 2017 adalah **“Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Investasi dan Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan Kemiskinan”**.

Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, dijelaskan bahwa penyusunan RKPD harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2018 dalam RPJMD, rencana kerja pemerintah serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sasaran dan prioritas yang tertuang dalam RKPD tahun 2018 diharapkan mendukung pencapaian 10 Prioritas dan 30 Program Prioritas Nasional seperti yang tertuang dalam Rancangan RKP tahun 2018. Arah kebijakan pembangunan daerah Kota Mataram tahun 2018 sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 juga berpedoman kepada Standar Pelayanan



Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta beberapa prioritas lainnya yaitu:

1. Terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
2. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
3. Pembinaan perencanaan pembangunan daerah
4. Persandian
5. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
6. Kependudukan dan catatan sipil
7. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
8. Pemberdayaan masyarakat dan desa
9. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi
10. Pengembangan sumber daya manusia
11. Pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan
12. Pengembangan ekonomi daerah
13. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
14. Perdagangan
15. Peningkatan produktivitas kerja
16. Pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah
17. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
18. Pemberdayaan komunikasi dan informatika
19. Penyelenggaraan penanaman modal
20. Pemberdayaan pemuda dan olahraga
21. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
22. Peningkatan pelayanan ketahanan pangan
23. Pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang
24. Penanganan bencana
25. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum
26. Pembangunan prasarana pemerintahan
27. Program pengembangan perpustakaan
28. Program kearsipan



Sasaran strategis pembangunan daerah tahun 2018 difokuskan pada peningkatan dan penanganan terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021, yang terdiri dari 3 (tiga) aspek pembangunan yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kinerja pembangunan daerah yang mendukung pencapaian aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, angka kemiskinan, angka harapan lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan, partisipasi angkatan kerja perempuan, pendapatan perkapita, angka Indeks Pembangunan Manusia, skor Pola Pangan Harapan, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah lembaga ekonomi produktif berbasis keagamaan.

2. Aspek Pelayanan Umum

Indikator kinerja pembangunan daerah yang mendukung pencapaian aspek Pelayanan Umum terdiri dari presentase penduduk ber-KTP, prevalensi balita gizi buruk, persentase pranata adat terhadap jumlah lingkungan, persentase penanganan pelanggaran PERDA dan PERWAL, cakupan peserta KB aktif, cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, persentase rumah tangga pengguna air bersih, persentase rumah layak huni, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah dan persentase penanganan sampah.

3. Aspek Daya Saing Daerah

Indikator kinerja pembangunan daerah yang mendukung pencapaian aspek daya saing daerah terdiri dari target opini laporan keuangan pemerintah daerah, proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah, proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah, target penilaian maturitas SPIP, target kapabilitas APIP, kunjungan wisatawan, angka kriminalitas, cakupan SKPD yang berada di zona hijau sesuai standar ombudsman, indeks kepuasan layanan masyarakat, jumlah inovasi pelayanan publik, nilai investasi, tingkat perkembangan WUB, penerapan standar pelayanan minimum dan pendaftaran HAKI produk hasil karya daerah.

Dalam mencapai 3 (tiga) aspek pembangunan sebagai sasaran strategis pembangunan daerah Kota Mataram di atas, diwujudkan dengan menetapkan prioritas pembangunan tahun 2016-2021 sesuai dengan isu strategis yaitu:

1. Budaya



2. Kondusifitas Wilayah
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Daya Saing Perekonomian Daerah
6. Kemiskinan
7. Infrastruktur
8. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
9. Kependudukan dan Catatan Sipil
10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Selanjutnya, keterkaitan antara program prioritas pada RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021 dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
1	Budaya	Budaya
2	Kondusifitas Wilayah	Peningkatan kerukunan internal dan antar umat beragama dan antar budaya Pembangunan sarana penunjang kehidupan beragama yang memadai
3	Kesehatan	Kesehatan untuk semua, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Subsidi biaya kesehatan bagi warga masyarakat yang terkategori miskin Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan dasar maupun lanjutan Pelayanan kepada penyandang cacat dan rehabilitasi pemakai narkoba (NAPZA) Penguatan keberadaan Kota Mataram sebagai Kota Layak Anak, Kota Layak Huni dan Kota Layak Lansia. Peningkatan dan inovasi manajemen puskesmas berbasis teknologi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4	Pendidikan	Subsidi biaya pendidikan bagi siswa dari kalangan keluarga miskin
		Pemerataan kualitas pelayanan pendidikan antar wilayah maupun antar level pendidikan Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi Pengembangan sekolah unggulan



NO	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
		Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5	Daya Saing Perekonomian Daerah	Penciptaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil
		Pengembangan standarisasi produk dan jasa
		Revitalisasi, memperkuat dan memperbanyak tumbuhnya jiwa <i>entrepreneurship</i> dalam wadah Koperasi dan UMKM
		Peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha lokal.
		Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa secara terpadu.
6	Kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan
		Penyiapan mekanisme dan sistem permodalan usaha mikro kecil dan koperasi
		Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
		Penataan rumah layak huni
		Menciptakan 100 wirausaha baru.
7	Infrastruktur	Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur transportasi perkotaan
		Pembangunan sarana dan prasarana permukiman yang bersih dan sehat
		Sambungan air minum ke rumah-rumah penduduk berpenghasilan rendah
		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perekonomian rakyat.
		Membangun akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak
		Pelaksanaan program 100-0-100
		Pengembangan transportasi massal
		Revitalisasi pasar tradisional
8	Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Penataan daerah aliran sungai dan sempadan sungai
		Penataan, penambahan dan revitalisasi taman-taman kota
		Konservasi sumber daya air
		Revitalisasi Kota Tua
		Pembangunan berbasis lingkungan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan
		Penanganan terpadu Ampenan sebagai bagian dari Jaringan Kota Pusaka Indonesia
		Penanganan persampahan secara terpadu
		Pembangunan prasarana sumber daya air
9	Kependudukan dan Catatan Sipil	Pembangunan sarana dan prasarana layanan kependudukan yang memadai



NO	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
		Peningkatan layanan kependudukan yang berkualitas
10	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Pengembangan manajemen pendidikan berbasis Tata Pemerintahan Yang Baik
		Peningkatan pelayanan perijinan terpadu
		Keterbukaan partisipasi masyarakat
		Pemantapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
		Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
		Optimalisasi sistem dan pelayanan penerimaan pendapatan daerah
		Pemantapan manajemen aset daerah
		Penerapan teknologi digital dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan komunikasi publik

Masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.2
**Penjelasan Program Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun 2018
 Berdasarkan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
1	Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Proporsi Lembaga Adat terhadap Jumlah Lingkungan	338 lembaga adat	Dinas Pariwisata
		Program pengembangan nilai budaya	Persentase Budayawan terhadap jumlah lingkungan	118 tokoh budaya	
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		90%	
2	Kondusifitas Wilayah	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Waktu Penyelesaian Penanganan Konflik	95 %	Bakesbangpol dan Satpol PP
		Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah		100%	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Daya Tangkal terhadap Potensi Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	90%	
		Program Bantuan Sosial Organisasi Sosial Masyarakat	Jumlah perpustakaan pada tempat ibadah	100%	Sekretariat Daerah



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase pemberantasan penyakit masyarakat	100%	Bakesbangpol dan Satpol PP
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan daya tanggap darurat	10 menit	PMK
3	Kesehatan	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Tersedianya puskesmas yang sesuai dengan standar pelayanan	11 puskesmas	Dinas Kesehatan
		Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Tersedianya tenaga medis yang memadai	92%	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tersedianya layanan kesehatan dasar bagi pasien	97%	
			Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	90%	
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	97%	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Pelayanan Anak Balita	98,2%	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Kesehatan Perorangan	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan	100%	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	40%	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam	100%	
		Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Cakupan Penanganan Masalah Anak terhadap Jumlah Permasalahan Anak keseluruhan	89 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Pemenuhan 31 Indikator Kota Layak Anak	80%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS Peserta KB Aktif terhadap Jumlah Keseluruhan Peserta KB	100%	
		Program Pelayanan Kontrasepsi	Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	98%	
		Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dan Kelompok Usaha dalam Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan	Cakupan Advokasi KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)	87%	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan Advokasi KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)	98%	
		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Cakupan Advokasi KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)	98%	
		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Keluarga Sejahtera terhadap Jumlah Seluruh Keluarga (KK)	90%	
		Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat		90%	
4	Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Cakupan penduduk usia 5-7 tahun yang bersekolah	92%	Dinas Pendidikan
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Cakupan penduduk usia 7-15 tahun yang bersekolah	100%	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tersedianya tenaga kependidikan yang bersertifikat	91%	Dinas Pendidikan
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rasio jumlah pendidik dan tenaga kependidikan terhadap jumlah siswa	100%	
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Rumah Ibadah terhadap seluruh rumah ibadah	74%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Daya Saing Perekonomian Daerah	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan Layanan Informasi Harga komoditas	33%	Dinas Perdagangan
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Presentase pelaku usaha yang dilatih	34%	Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Presentase kelompok penerima bantuan	7.4%	
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase nilai investasi	51%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program pemberdayaan penyuluh Pertanian/ perkebunan lapangan	Persentase jumlah penyuluh yang dilatih	75%	Dinas Pertanian dan Dinas Pangan
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase hasil terapan visitasi	78%	Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program pengembangan destinasi pariwisata	Daya tampung terhadap pelaku seni	34%	Dinas Pariwisata
		Program Peningkatan	Persentase angkatan kerja	3%	Dinas Tenaga



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	yang terlatih		Kerja
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus yang ditangani	30%	
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Cakupan layanan informasi	35%	Dinas Tenaga Kerja
6	Kemiskinan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap Keseluruhan PMKS yang ada	93%	Dinas Sosial
		Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang ditangani	95%	
		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah penyandang penyakit sosial yang dapat dibina	97%	
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah sosialisasi dan penguatan kelembagaan kessos	97.5%	
		Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase rumah yang tertangani akibat bencana	100%	BPBD
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase Penduduk Miskin yang mendapat bantuan	94%	Dinas Sosial
		Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Daya serap anggaran penanggulangan kemiskinan terhadap seluruh anggaran yang disediakan		Bappeda
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan	Persentase produksi hasil olahan perikanan	25%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Persentase jumlah masyarakat nelayan yang memperoleh modal usaha		
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Pelatihan Wirausaha yang melibatkan pemuda	88%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan PER	Persentase kelompok yang menerima bantuan	100%	Sekretariat Daerah
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase upaya pengembangan ekonomi kelurahan	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Tersalurkannya aspirasi masyarakat	80%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	Terbangunnya mekanisme pembangunan partisipatif	30%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Kelurahan yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kelurahan (SIMKEL) yang baik	20%	
7	Infrastruktur	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase penambahan panjang jalan kota	10 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan kota yang terpelihara	18.7%	
		Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Cakupan layanan irigasi (mempertahankan)	3.600 Ha	
		Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan	Cakupan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh	600 Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah tangga sanitasi layak		
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase pengurangan rumah tidak layak huni	5%	
		Program Pemeliharaan/ Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase luas areal pemakaman dalam kondisi baik	20%	Dinas Pertamanan
		Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU	Persentase fasilitas PJU	65%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame	Persentase reklame yang sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan	45%	Dinas Pertamanan
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan wilayah yang terlayani angkutan publik	6 rute	Dinas Perhubungan
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarpras perhubungan dalam kondisi baik	80%	
		Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	65%	
		Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	70%	
		Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas	Cakupan ketersediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan	75%	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Persentase lokasi parkir yang terkelola	85%	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Perda Pengelolaan Air Limbah		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase lembaga pengelolaan air limbah yang berfungsi	30%	
			Persentase lahan yang tersedia untuk pengelolaan air limbah	25%	
			Cakupan pengelolaan air limbah	89%	
			Cakupan pelayanan air bersih	75%	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase lembaga pengelolaan sampah yang berfungsi	35%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan
			Cakupan pengelolaan sampah	78%	
			Nota Kesepahaman (MoU)	1	
			Persentase pengurangan sampah	1%	
		Program Perencanaan Tata Ruang	Perda Penataan Ruang	1 perda	
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA	12 kali koordinasi	Bappeda
		Program Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase kesesuaian rencana dengan pemanfaatan ruang	62%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase ketidaksesuaian pemanfaatan tata ruang	38%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase kasus yang tertangani	100%	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pembangunan yang memiliki analisis dampak lingkungan	100%	
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Persentase sekolah berwawasan lingkungan	70%	
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	23%	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rasio jumlah kelompok peduli bencana terhadap daerah rawan bencana	8:20	BPBD
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Daya tanggap darurat	15 menit	Dinas Pemadam Kebakaran
		Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Persentase tanah milik daerah yang telah bersertifikat	85%	Badan Keuangan Daerah dan Sekretariat Daerah
9	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan prasarana layanan Penerbitan Kartu Keluarga	97.5%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Cakupan prasarana layanan Penerbitan KTP	96%	
			Cakupan prasarana layanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	95%	
			Cakupan prasarana layanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	95%	
		Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	Cakupan Waktu Penyelesaian Layanan Kependudukan	91.5%	
10	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan	8 dok	Bappeda
			Tingkat/Persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang	≥ 40%	
		Program Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen	7 dok	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan gedung kelurahan sesuai kebutuhan	85%	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya dokumen kelembagaan Pemda	1 dok	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase validitas data barang milik daerah	92%	Sekretariat Daerah
		Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian realisasi program SKPD	60%	
		Program Pendidikan Kedinasan	Cakupan Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklatpim	94%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan PERDA yang ditetapkan sesuai kebutuhan	97%	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Pengawasan Internal dan	Cakupan tersedianya dokumen Laporan Hasil	100%	Inspektorat



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pemeriksaan		
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Cakupan peluang penjenjangan fungsional auditor	85%	
		Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN	Cakupan tersedianya kelembagaan sesuai fungsi	98.5%	Sekretariat Daerah
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Produk Hukum yang ditetapkan sesuai kebutuhan	90%	
		Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase validitas data barang milik daerah	92%	Badan Keuangan Daerah
			Persentase peningkatan PAD	6.36%	
		Program Kerjasama Pembangunan	Cakupan koordinasi kerjasama dan kajian pembangunan	12 kali koordinasi	Bappeda

Adapun sinkronisasi antara prioritas pembangunan Kota Mataram dalam RKPD 2018 dengan prioritas Nasional dalam RKP 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Mataram dengan Prioritas Nasional RKP 2018

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
1	Pendidikan	Pendidikan Vokasi	Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri	<i>*Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (SMA sederajat) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi berada pada kewenangan pusat</i>
			Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi	
			Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan Kecakapan kerja	
			Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi yang Berkualitas	
			Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi	
		Peningkatan kualitas guru	Revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK)	



NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			Peningkatan Profesionalisme Guru	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Pengelolaan dan Distribusi Guru	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
			Peningkatan Kesejahteraan Guru	
2	Kesehatan	Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia
			Perbaikan Kualitas Gizi Ibu dan Anak	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
			Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	Program Pengendalian penyakit Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular
			Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular	Program Pengendalian penyakit Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular
		Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	Pengamatan, Imunisasi, Penyakit dan Karantina Kesehatan	Program Pengendalian Penyakit Kegiatan Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
			Lingkungan Sehat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
			Konsumsi Pangan Sehat	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
			Peningkatan Pemahaman Hidup Sehat	Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3	Perumahan dan Permukiman	Penyediaan Perumahan Layak	Penciptaan Iklim Kondusif penyediaan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			Penyediaan dan peningkatan Kualitas Perumahan MBR	
			Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR	



NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			Pengentasan Pemukiman kumuh	
		Air Bersih dan Sanitasi	Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
			Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Pengembangan Danau Toba	<i>*Tidak termasuk lokasi kegiatan program prioritas</i>
			Pengembangan Borobudur dan sekitarnya	
			Pengembangan Mandalika	Program pengembangan destinasi pariwisata
			Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas	<i>*Tidak termasuk lokasi kegiatan program prioritas</i>
		Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)	Percepatan Pembangunan KEK Sorong	<i>*Tidak termasuk lokasi kegiatan program prioritas</i>
			Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang	
			Percepatan Pembangunan KEK Bitung	
			Percepatan Pembangunan KEK MBTK	
			Percepatan Pembangunan KEK Morotai	
		Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)	Pengembangan KI Sei Mangkei	<i>*Tidak termasuk lokasi kegiatan program prioritas</i>
			Pengembangan KI Morowali	
			Pengembangan KI Bantaeng	
			Dukungan Pengembangan KI	
		Perbaikan iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja	Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
			Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
			Percepatan Fasilitasi	Program Peningkatan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			Penyelesaian Masalah Investasi	Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perijinan Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sistem Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal
			Peningkatan Persaingan Usaha yang Sehat	
			Iklm Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	
			Pengembangan keahlian tenaga kerja	
			Layanan Informasi Pasar kerja	
			Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri	
			Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	
		Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi	Peningkatan Fasilitas Ekspor	
			Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor	
			Peningkatan Efektivitas Promosi dan Akses Pasar	
			Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha	
			Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah Tinggi	
5	Ketahanan Energi	Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Pengembangan PLT Hidro dan Nuklir	<i>*Tidak termasuk lokasi kegiatan program prioritas</i>
			Pengembangan PLT Panas Bumi	
			Pengembangan Bioenergi	
			Pengembangan Industri Penunjang EBT, dan Konservasi Energi	
			Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (<i>Small Grid System</i>)	
			Implementasi Teknologi	<i>*Tidak termasuk lokasi</i>



NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			Bersih dan Efisien	<i>kegiatan program prioritas</i>
			Penyempurnaan <i>Feed In Tariff</i> , Subsidi dan Kelembagaan EBT	
		Pemenuhan Kebutuhan Energi	Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik	<i>*Tidak termasuk lokasi kegiatan program prioritas</i>
			Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
			Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi	<i>*Tidak termasuk lokasi kegiatan program prioritas</i>
			Pembentukan Cadangan Penyangga Energi	
			Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi	
Pemenuhan DMO Batubara dan Gas Bumi				
6	Ketahanan Pangan	Peningkatan Produksi Pangan	Produksi Padi 79,3 juta ton	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
			Produksi Jagung 23,4 juta ton	
			Produksi Gula 3,2 juta ton	
			Produksi Daging sapi 710 ribu ton	
			Produksi Ikan 17,4 juta ton dan Garam 4,1 juta ton	
			Produksi Hortikultura: Cabai Rawit dan Merah 2,2, Bawang Merah 1,4 juta ton, Jeruk 1,8 juta ton, Mangga 2,5 juta ton	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Pembangunan dan Rehabilitasi bendungandan embung	Tidak ada lahan untuk waduk			



NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			Perbaikan Data Statistik Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Penyusunan Data Statistik Pertanian
			Sarana pasca panen	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil pertanian
			Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dan Peternakan
			Sarana dan prasarana peningkatan konsumsi pangan di 34 provinsi	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Rumah Pangan Lestari
			Alat dan mesin pertanian	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
			Perluasan lahan pertanian	<i>*pengurangan sih ada</i>
7	Penanggulangan Kemiskinan	Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	-
			Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan	a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
			Bantuan Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu
			Subsidi Energi Tepat Sasaran	
			Penguatan Bantuan Tunai Bersyarat	
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan
		Penyediaan Infrastruktur Dasar	1.Program Pengembangan	



NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			(rumah sanitasi, air minum, jalan/jembatan)	Perumahan Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (UPTD) 2.Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
			Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Kegiatan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
			Fasilitasi pembiayaan perumahan	
		Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi	Registrasi usaha skala mikro dan kecil	Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
			Sarana dan prasarana usaha bagi UMKM	Program Penataan Struktur Industri Kegiatan Pemberian Bantuan peralatan Bagi Industri Kecil
			Sertifikasi, standarisasi, merek dan pengemasan	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Kegiatan Standarisasi dan Legalitas Usaha UMKM
			Akses kredit UMKM	-
			Perbaikan tata kelola dan kembangaaan koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
8	Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda)	Konektivitas	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
			Aksesibilitas	*Tidak termasuk dalam daerah 3T
			Transportasi Perkotaan	a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika	Akses Internet untuk Daerah Non Komersil	-
			Penguatan Penyiaran di	-



NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			Daerah Perbatasan	
			Optimalisasi Penggunaan TIK pada Instansi Pemerintah	-
			Dukungan TIK pada Sektor Prioritas (<i>e-commerce, e-health, dll</i>)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Pelayanan pengadaan Barang dan jasa
			Pembangunan Jaringan Pita Lebar	-
9	Pembangunan Wilayah	Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal	Peningkatan sarana dan Prasarana	*Kota Mataram tidak termasuk dalam Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan
			Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara	
			Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas	
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	
		Pembangunan Perdesaan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum	*Kota Mataram tidak memiliki Desa
			Penguatan pemerintahan desa	
			Pengawasan implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa	
			Pengembangan ekonomi kawasan	
		Reforma Agraria	Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria	-
			Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	Program pengembangan sistem informasi pertanahan
			Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reformas Agraria	-
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA	-
		Pencegahan dan Penanggulangan	Pemulihan Daerah Pascabencana	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial



NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		
		Bencana	Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		
			Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		
			Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan Perencanaan Pengembangan Wilayah		
		Percepatan Pembangunan Papua		Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan pelayanan kesehatan	*Prioritas Nasional di daerah Provinsi Papua dan Papua Barat	
				Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Wilayah Adat		
				Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan		
				Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar		
				Pengembangan Konektivitas Wilayah		
		10	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Penguatan Pertahanan	Peningkatan Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit	-
					Pembangunan MEF II	-
Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan	*Kota Mataram tidak termasuk daerah perbatasan					
Stabilitas Politik dan Keamanan				Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik	-	
				Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
				Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri	-	
				Pemantapan Peran di ASEAN	-	
				Penguatan Diplomasi (Politik, Ekonomi, Maritim)	-	
				Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
				Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan	-	



NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			Narkoba	
		Kepastian Hukum	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah
			Pencegahan dan pemberantasan Korupsi yang Efektif	-
			Perluasan Implementasi eGovernment yang Terintegrasi	<p>a. Program perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah</p> <p>c. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>d. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan PENataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis</p>
		Reformasi Birokrasi	Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan	<p>a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.</p> <p>b. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan</p> <p>c. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</p>
			Penguatan Tata Kelola dan Manajemen SDM Aparatur	<p>a. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur</p> <p>b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</p> <p>c. Program Pendidikan Kedinasan</p> <p>d. Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN</p> <p>e. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</p> <p>f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah kegiatan Pemantauan Rencana Aksi</p>



NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
				Pencegahan dan pemberantasan Korupsi